



REVIU RENSTRA

(Rencana Strategis)

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Sumenep
Tahun 2016 - 2021



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Periode Tahun 2016 - 2021, dapat diselesaikan dengan baik.

Menjadi kesadaran yang mendalam, bahwa dalam pembuatan Perubahan Renstra ini masih banyak ditemui kekurangan dan kelemahan. Untuk itu segala input konstruktif sangat diharapkan guna kesempurnaan pelaksanaan program di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep pada masa mendatang serta sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan rencana program maupun dalam implementasinya.

Akhirnya penghargaan dan ungkapan rasa terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penyusunannya, dengan harapan Perubahan Renstra ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan dan perencanaan pembangunan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pada tahun anggaran 2016 - 2021.

Sumenep, 31 Januari 2019

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



R. TITIK SURYATI, SH, MH.

Pembina Utama Muda
NIP. 19660409 199302 2 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I	PENDAHULUAN 1
1.1	Latar Belakang 1
1.2	Landasan Hukum 3
1.3	Maksud dan Tujuan 5
1.4	Sistematika Penulisan 6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN BKPSDM 9
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 9
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah 22
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 27
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 31
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BKPSDM 33
3.1	Identifikasi Permasalahan 33
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 39
3.3	Telaahan Renstra Kementrian Terkait dan Renstra Dinas Terkait Propinsi Jawa Timur 40
3.4	Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 43
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis 43
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN 45
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 45
4.2	Tujuan dan Sasaran Pendukung 50
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 51
5.1	Strategi 51
5.2	Kebijakan 52

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	54
6.1	Program dan Kegiatan	54
6.2	Kelompok Sasaran	63
6.3	Pendanaan Indikatif	63
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	74
BAB VIII	PENUTUP	77

Lampiran

DAFTAR TABEL

Gambar 1.1	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan	2
Gambar 2.1	Struktur Organisasi BKPSDM Kab. Sumenep	21
Tabel 2.1	Rekapitulasi Pegawai BKPSDM Kab. Sumenep Berdasarkan Golongan Ruang Menurut Jenis Kelamin	22
Grafik 2.1	Komposisi Pegawai BKPSDM Kab. Sumenep Berdasarkan Golongan Ruang menurut Jenis Kelamin	23
Tabel 2.2	Rekapitulasi Pegawai BKPSDM Kab. Sumenep Berdasarkan Pendidikan Menurut Jenis Kelamin	23
Grafik 2.2	Komposisi Pegawai BKPSDM Kab. Sumenep Berdasarkan Pendidikan Menurut Jenis Kelamin	24
Tabel 2.3	Rekapitulasi Pegawai BKPSDM Kab. Sumenep Berdasarkan Eselon Menurut Jenis Kelamin	24
Grafik 2.3	Komposisi Pegawai BKPSDM Kab. Sumenep Berdasarkan Eselon Menurut Jenis Kelamin	25
Tabel 2.4	Rekapitulasi Pegawai BKPSDM Kab. Sumenep Berdasarkan Jenis Kelamin	25
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana BKPSDM Kab. Sumenep	27
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2018	28
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKPSDM Kabupaten Sumenep	29
Tabel 3.1	Rekapitulasi Perpindahan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep	34
Tabel 3.2	Rekapitulasi Penjatuhan Hukuman Disiplin di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep	34
Tabel 3.3	Rekapitulasi Data Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep	35
Tabel 3.4	Rekapitulasi Data Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur (<i>Assesment</i>) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep	35
Tabel 3.5	Rekapitulasi Data Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur (<i>Diklat Struktural dan Fungsional</i>) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep	35
Tabel 3.6	Rekapitulasi Perkembangan Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep	36
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Sebelum Perubahan Renstra	48
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Setelah Perubahan Renstra	49

Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Dan Strategi/Kebijakan	53
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2018	64
	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2019 – 2021	70

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manajemen Sumber Daya Aparatur merupakan konsekuensi dari tuntutan perubahan yang begitu cepat politik, ekonomi dan sosial. Hal ini ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menjelaskan bahwa Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang professional, memiliki dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya.

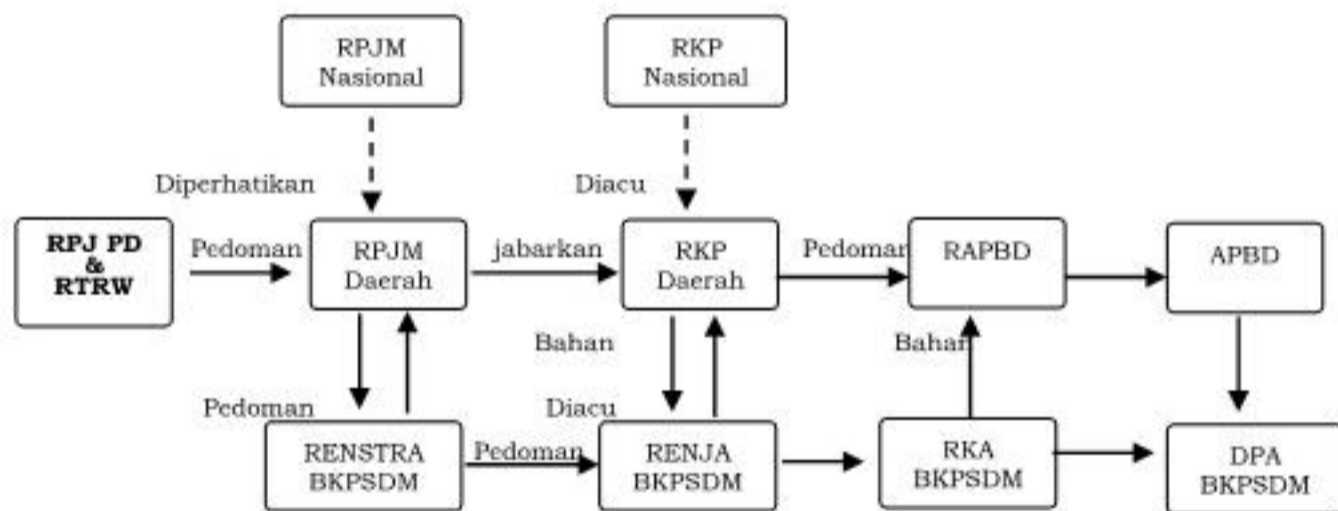
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 64 Tahun 2016 dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dengan Tipe A dan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian. Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep mencakup :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
2. Penyempurnaan sasaran perangkat daerah serta perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah;
3. Penyempurnaan indikator kinerja dan target kinerja tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir;
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan;

Keterkaitan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Gambar 1.1

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 yang pelaksanaannya akan dijabarkan di dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep setiap tahun mulai Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.

Renja OPD menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran OPD (RKA-OPD). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja dll), kegiatan (proses) dan *output/outcome*. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan daerah. *Critical pointnya* adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan *output/outcome*.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini dilakukan dengan melandaskan diri pada sejumlah aturan perundangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015– 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep;

11. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep;
12. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep antara lain adalah :

1.3.1 Maksud

- a. Menjabarkan secara teknis operational Reviu RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 yang akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep;
- b. Menyediakan rujukan teknis bagi penyusunan Renja OPD tahunan, sebagai dasar masukan untuk penyusunan RKPD, KUA dan PPAS dengan, menggunakan pendekatan kinerja yang terukur;
- c. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik Laporan Realisasi Anggaran Triwulanan, Tahunan serta LKjIP dan masukan bagi penyusunan LKPJ Bupati Sumenep.

1.3.2 Tujuan

- a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang memuat strategi pembangunan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap substansi dasar dari Review Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep ini serta arah kebijakan yang akan ditempuh dalam mewujudkan visi dan misi dan rencana program, maka pola pikir yang digunakan dalam penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut :

Review Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 2.1. Landasan Hukum
- 3.1. Maksud dan Tujuan
- 4.1. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep

- 2.2 Sumberdaya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB VI RENCANA PROGAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan indikasi rencana program dan kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk periode lima tahunan, yang akan disajikan dalam bentuk Tabel.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia serta tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
2. perumusan kebijakan dan penetapan rencana program dan kegiatan Badan;
3. penyelenggaraan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informasi kepegawaian;

4. penyelenggaraan penilaian kinerja aparatur, pembinaan, penghargaan, dan kesejahteraan pegawai;
5. penyelenggaraan mutasi, promosi, pengembangan karier dan pengembangan kompetensi aparatur;
6. penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kelembagaan profesi ASN;
7. pelaksanaan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan kegiatan; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat;
3. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;
4. Bidang Mutasi dan Promosi;
5. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;
6. Bidang Pengembangan Aparatur;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan masing-masing uraian tugas sebagai berikut :

- 1) **Sekretariat** mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan, keuangan dan kearsipan Badan.

Dengan Fungsi :

- a. penyusunan program kerja kesekretariatan;
- b. penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;

- c. pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan, peralatan, pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, pengelolaan dan pemeliharaan gedung sarana kegiatan diklat serta proses regulasi program dan kegiatan;
- d. penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Badan;
- e. penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.1) Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum, kearsipan dan kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan kegiatan keprotokolan, administrasi perjalanan dinas dan pembinaan ketatalaksanaan serta mengelola arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital, dan menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan daerah;
- c. memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan, kebersihan kantor, pengelolaan dan pemeliharaan gedung sarana kegiatan diklat serta melaksanakan pungutan pendapatan asli daerah (PAD) atas penggunaan gedung sarana kegiatan diklat;

- d. menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier dan pembinaan pegawai di lingkungan Badan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

1.2) Sub Bagian Program dan Perencanaan, mempunyai tugas :

- a. menyusun dan mengoordinasikan program kerja pelaksanaan tugas program dan perencanaan;
- b. menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan;
- c. menghimpun dan memproses regulasi program dan kegiatan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

1.3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- b. menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- d. memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 2) **Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan** mempunyai tugas melaksanakan urusan penilaian kinerja aparatur, pembinaan, dan penghargaan.

Dengan Fungsi :

- a. perumusan kebijakan penilaian kinerja, pembinaan dan penghargaan;
- b. perencanaan pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja, pembinaan dan penghargaan;
- c. pengkoordinasian kegiatan dan evaluasi hasil penilaian kinerja aparatur;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi pelaksanaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin dan pemberian penghargaan;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja, pembinaan dan penghargaan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan.

- 2.1) Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur mempunyai tugas :

- a. merencanakan dan melaksanakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur;
- b. membuat informasi terkait indikator penilaian kinerja aparatur;
- c. menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan hasil penilaian kinerja aparatur;
- d. melaksanakan fasilitasi penilaian dan evaluasi kinerja aparatur; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- 2.2) Sub Bidang Pembinaan Disiplin mempunyai tugas :
- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan disiplin aparatur;
 - b. mengelola penyelesaian pelanggaran disiplin aparatur;
 - c. mengevaluasi tingkat kehadiran dan disiplin aparatur;
 - d. melaksanakan fasilitasi pembinaan disiplin aparatur; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang.
- 2.3) Sub Bidang Kesejahteraan dan Penghargaan mempunyai tugas :
- a. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan kesejahteraan dan pemberian penghargaan aparatur;
 - b. memverifikasi dan mengkoordinasikan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur;
 - c. memverifikasi dan mengkoordinasikan pemberian jaminan/perlindungan, tunjangan kinerja/ tambahan penghasilan bagi aparatur;
 - d. melaksanakan pelayanan proses ijin perceraian pegawai, cuti pegawai, usulan Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu Istri (Karis), Kartu Suami (Karsu), Asuransi Kesehatan (Askes) dan Kartu Peserta Taspen (KPT); dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang.

- 3) **Bidang Mutasi dan Promosi** mempunyai tugas melaksanakan urusan mutasi, kepangkatan, pengembangan karier dan promosi.

Dengan Fungsi :

- a. perumusan kebijakan mutasi dan promosi;
- b. penyelenggaraan proses mutasi dan promosi;
- c. pengoordinasian pelaksanaan mutasi dan promosi;
- d. pelaksanaan verifikasi dokumen mutasi dan promosi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan mutasi dan promosi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan.

3.1) Sub Bidang Mutasi mempunyai tugas :

- a. merencanakan dan melaksanakan mutasi;
- b. memverifikasi dokumen mutasi;
- c. melaksanakan administrasi penempatan dari dan dalam jabatan pegawai berdasarkan klasifikasi jabatan;
- d. membuat daftar penjagaan pensiun dan memverifikasi dokumen usulan pensiun;
- e. mengevaluasi dan pelaporan kegiatan mutasi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang.

3.2) Sub Bidang Kepangkatan mempunyai tugas :

- a. membuat daftar penjagaan kenaikan pangkat;
- b. memverifikasi berkas usul kenaikan pangkat;
- c. mengusulkan berkas kenaikan pangkat;
- d. memverifikasi draf keputusan kenaikan pangkat dan memproses kenaikan gaji berkala;

- e. mengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan kepangkatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang.

3.3) Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi mempunyai tugas :

- a. menyusun pedoman pola pengembangan karir;
- b. menyusun daftar urutan kepangkatan;
- c. menganalisis dan memverifikasi berkas usulan promosi;
- d. mengevaluasi dan pelaporan pengembangan karir dan promosi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4) **Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi** mempunyai tugas melaksanakan urusan pengadaan, pemberhentian, data dan informasi, serta fasilitasi profesi ASN.

Dengan Fungsi :

- a. perumusan kebijakan pengadaan, pemberhentian dan informasi;
- b. penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan;
- c. penyelenggaraan pengadaan PNS dan PPPK;
- d. pengoordinasian pelaksanaan administrasi pemberhentian, pelaksanaan verifikasi dokumen administrasi pemberhentian dan verifikasi database informasi kepegawaian;
- e. pengoordinasian penyusunan informasi kepegawaian;

- f. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kelembagaan profesi ASN;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informasi; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan.
- 4.1) Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian mempunyai tugas :
- a. merencanakan dan melaksanakan pengadaan;
 - b. menyusun konsep pelaporan pelaksanaan pengadaan;
 - c. memproses dokumen pemberhentian;
 - d. mengevaluasi dan pelaporan pengadaan dan pemberhentian; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang.
- 4.2) Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas :
- a. merencanakan pengembangan sistem informasi kepegawaian;
 - b. mengelola sistem informasi kepegawaian;
 - c. menyusun data kepegawaian;
 - d. mengevaluasi sistem informasi kepegawaian; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang.
- 4.3) Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN mempunyai tugas :
- a. merencanakan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kelembagaan profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya);

- b. mengelola administrasi umum, kepegawaian dan kegiatan keorganisasian untuk mendukung tugas dan fungsi lembaga profesi ASN;
- c. mengoordinasikan tata hubungan kerja di setiap jenjang kepengurusan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang

- 5) **Bidang Pengembangan Aparatur** mempunyai tugas melaksanakan urusan kebutuhan diklat penjenjangan dan sertifikasi, kebutuhan diklat teknis dan fungsional serta pengembangan kompetensi aparatur.

Dengan Fungsi :

- a. perumusan kebijakan pengembangan kompetensi;
- b. penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
- c. pengoordinasian dan kerjasama pelaksanaan seleksi jabatan;
- d. pelaksanaan perencanaan kebutuhan diklat penjenjangan dan sertifikasi;
- e. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan diklat teknis fungsional;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kompetensi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan.

- 5.1) Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi mempunyai tugas :

- a. menyusun daftar kebutuhan diklat penjenjangan dan inventarisasi data calon peserta;
- b. mengusulkan peserta diklat penjenjangan dan peserta sertifikasi sesuai bidang keahlian;

- c. mengoordinasikan kerjasama pelaksanaan diklat;
- d. melaksanakan fasilitasi diklat tingkat dasar, pengawas, administrator dan pimpinan tinggi;
- e. mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan diklat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang.

5.2) Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional mempunyai tugas :

- a. menyusun daftar kebutuhan diklat teknis fungsional;
- b. menginventaris data calon peserta diklat teknis fungsional;
- c. mengusulkan peserta diklat teknis fungsional;
- d. mengoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan diklat;
- e. mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan diklat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang.

5.3) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan fasilitasi kegiatan pengembangan kompetensi;
- b. memverifikasi berkas usulan kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan kompetensi pemerintahan;
- c. membuat konsep pelaksanaan seleksi jabatan;
- d. memproses usulan peningkatan kualifikasi pendidikan melalui tugas belajar dan ijin belajar;

- e. mengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pengembangan kompetensi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang.

6) **Unit Pelaksana Teknis Daerah**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang sarana pendidikan dan pelatihan dan pelayanan masyarakat.

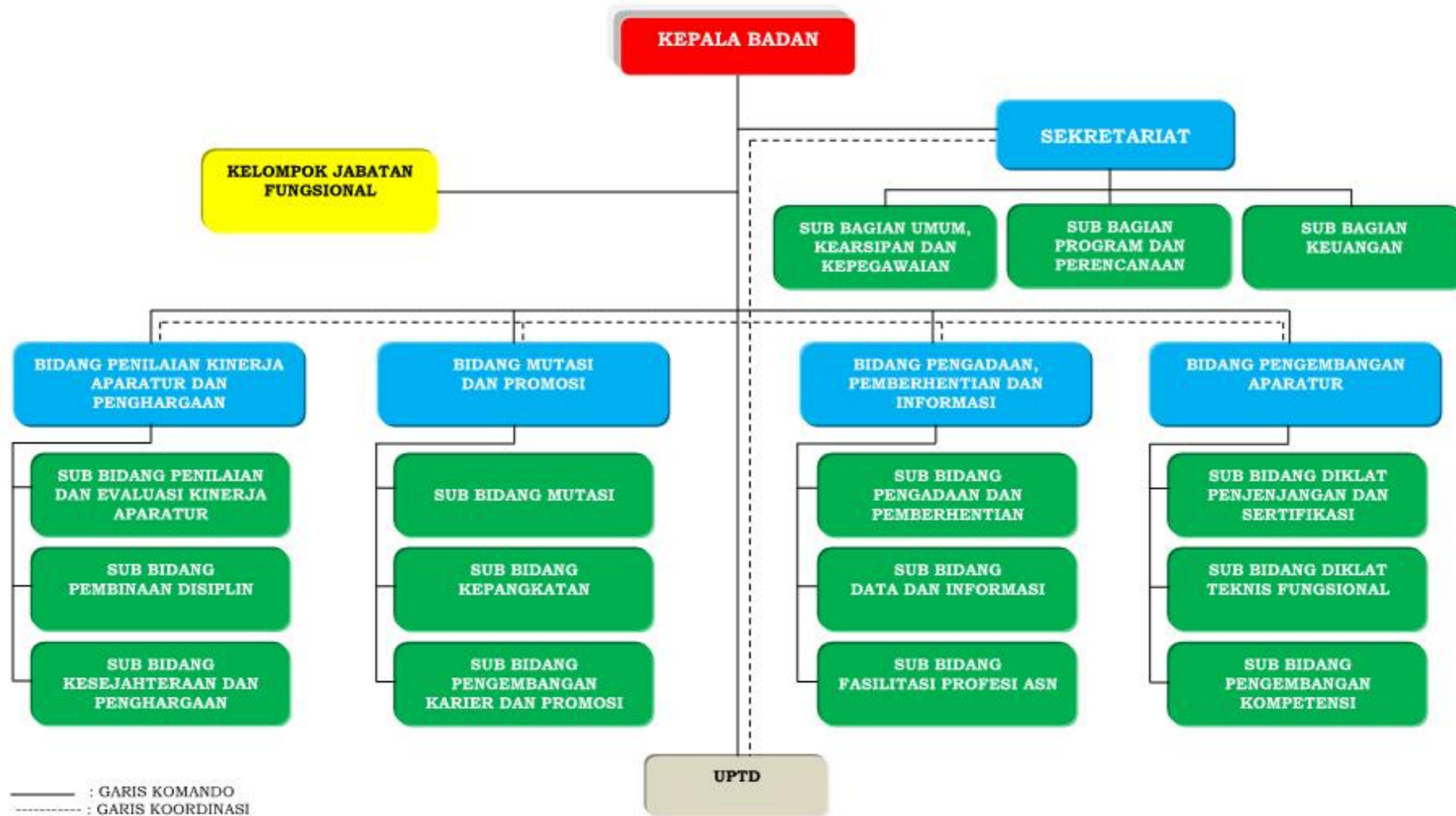
7) **Kelompok Jabatan Fungsional**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Untuk lebih jelasnya bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sumenep



2.2 Sumber Daya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep harus didukung oleh sumber daya manusia/aparatur dan parasarana yang memadai.

Dukungan SDM aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep keadaan bulan Januari 2019 sebanyak 64 orang (sumber database Sistem Informasi Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep), dengan klasifikasi berdasarkan golongan, jenjang pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana dapat dilihat pada grafik-grafik Data Statistik berikut :

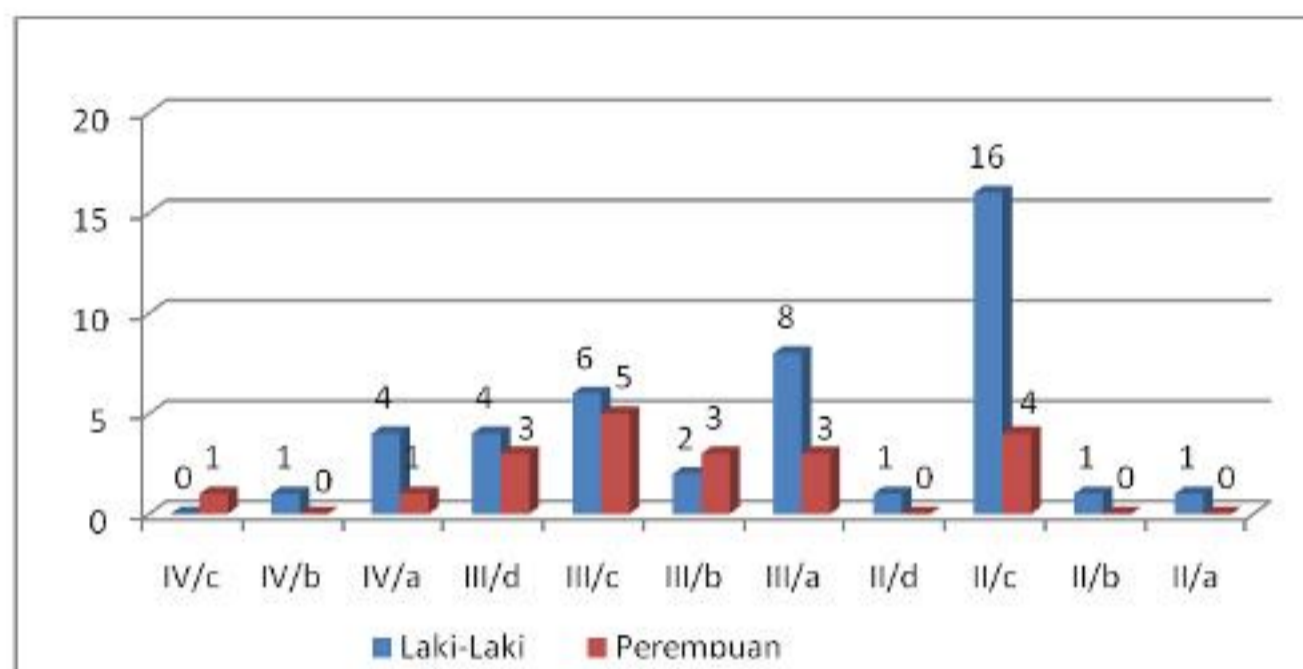
a. Berdasarkan Golongan Ruang

Tabel 2.1
Rekapitulasi Pegawai BKPSDM Kab. Sumenep
Berdasarkan Golongan Ruang Menurut Jenis Kelamin

No.	Golongan Ruang	Laki-Laki	Perempuan
1.	IV/d	0	0
2.	IV/c	0	1
3.	IV/b	1	0
4.	IV/a	4	1
5.	III/d	4	3
6.	III/c	6	5
7.	III/b	2	3
8.	III/a	8	3
9.	II/d	1	0
10.	II/c	16	4
11.	II/b	1	0
12.	II/a	1	0
	Jumlah	44	20

Sumber: Data Simpeg BKPSDM Kab. Sumenep Bulan Januari 2019

Grafik 2.1
Komposisi Pegawai BKPSDM Kab. Sumenep
Berdasarkan Golongan Ruang menurut Jenis Kelamin



Sumber : Data Simpeg BKPSDM Kab. Sumenep Bulan Januari 2019

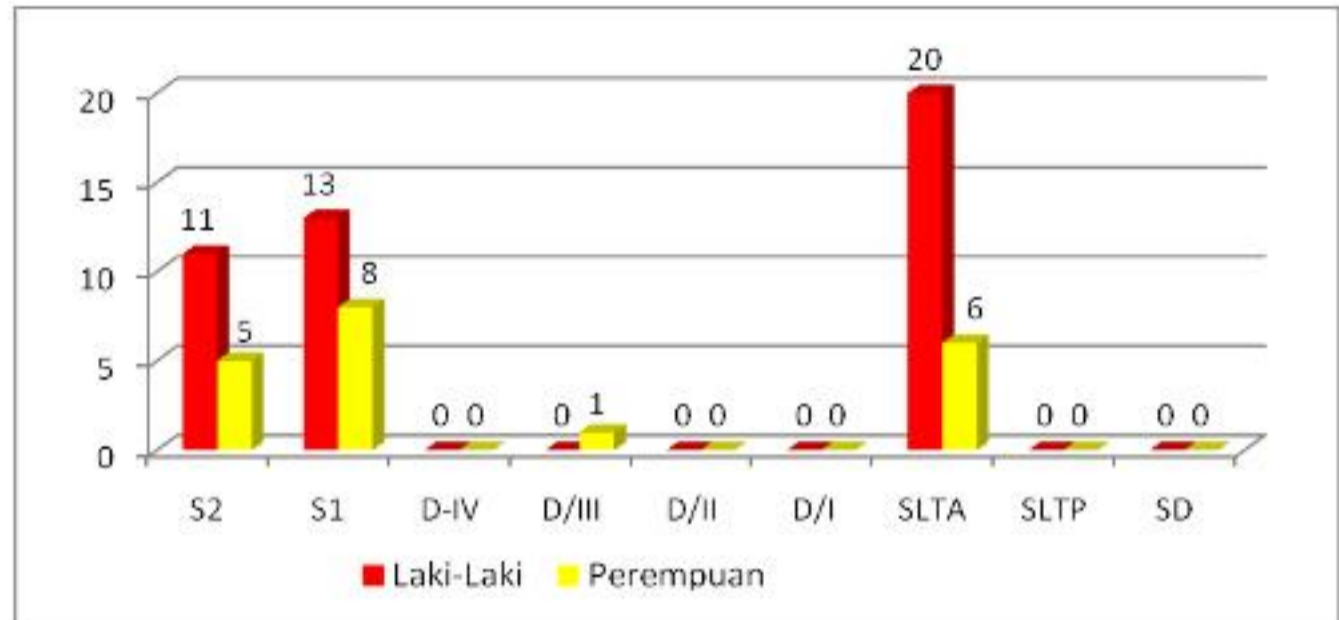
b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2
Rekapitulasi Pegawai BKPSDM Kab. Sumenep
Berdasarkan Pendidikan Menurut Jenis Kelamin

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
1.	S-2	11	5
2.	S-1	13	8
3.	D-IV	0	0
4.	D-III	0	1
5.	D-II	0	0
6.	D-I	0	0
7.	SLTA	20	6
8.	SLTP	0	0
9.	SD	0	0
	Jumlah	44	20

Sumber: Data Simpeg BKPSDM Kab. Sumenep Bulan Januari 2019

Grafik 2.2
Komposisi Pegawai BKPSDM Kab. Sumenep
Berdasarkan Pendidikan Menurut Jenis Kelamin



Sumber: Data Simpeg BKPSDM Kab. Sumenep Bulan Januari 2019

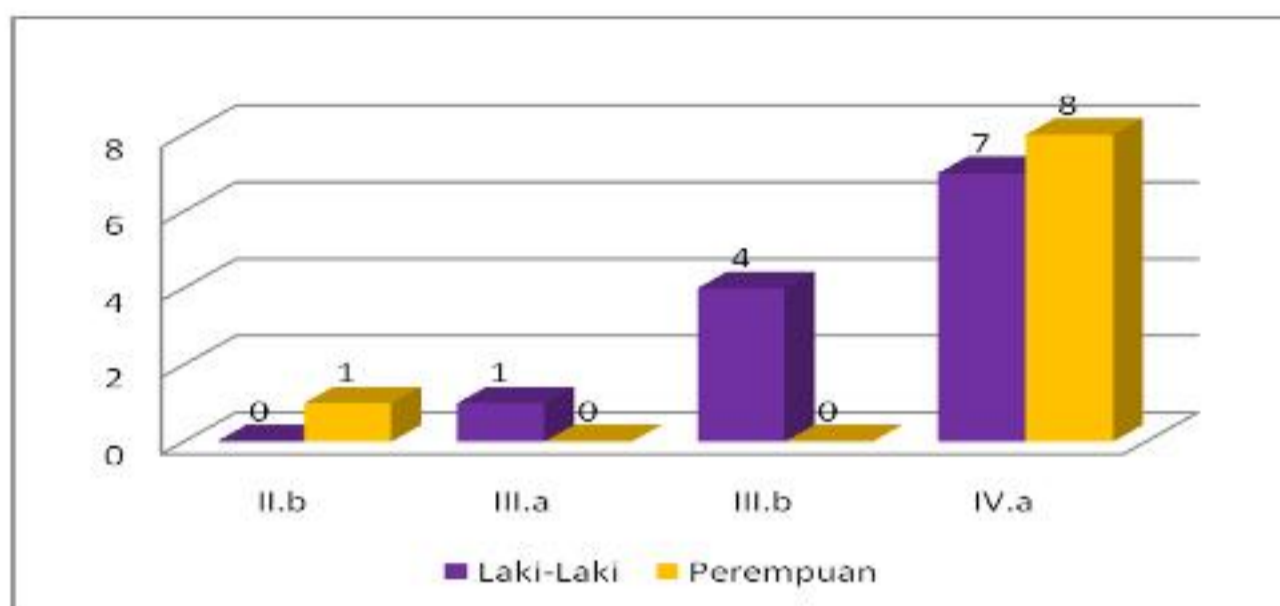
c. Berdasarkan Eselon

Tabel 2.3
Rekapitulasi Pegawai BKPSDM Kab. Sumenep
Berdasarkan Eselon Menurut Jenis Kelamin

No.	Eselon	Laki-Laki	Perempuan
1.	II.b	0	1
2.	III.a	1	0
3.	III.b	4	0
4.	IV.a	7	8
	Jumlah	12	9

Sumber: Data Simpeg BKPSDM Kab. Sumenep Bulan Januari 2019

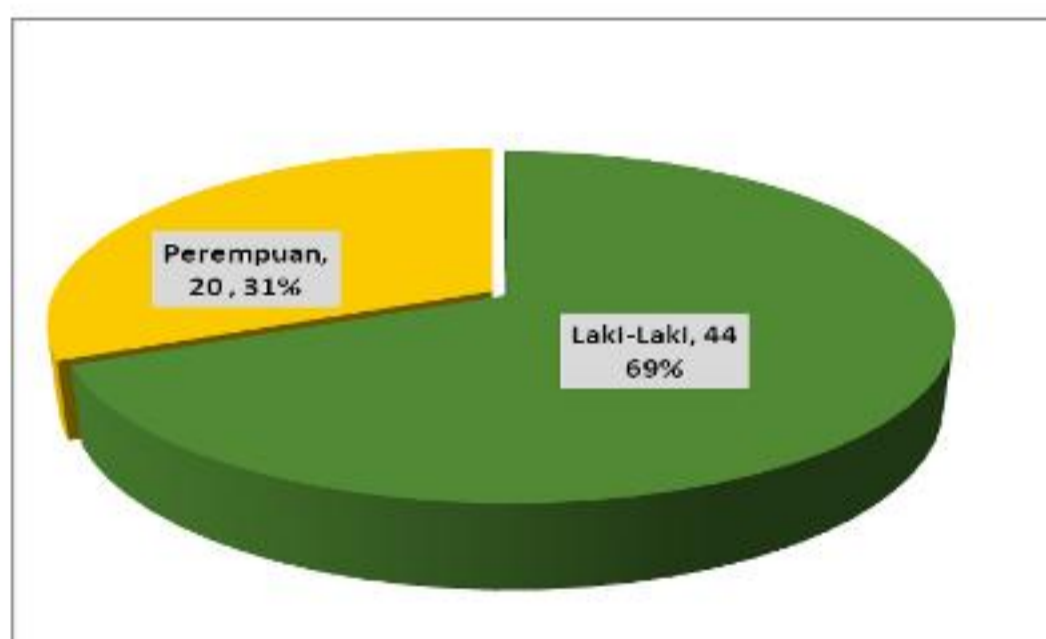
Grafik 2.3
Komposisi Pegawai BKPSDM Kab. Sumenep
Berdasarkan Eselon Menurut Jenis Kelamin



Sumber: Data Simpeg BKPSDM Kab. Sumenep Bulan Januari 2019

d. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.4
Rekapitulasi Pegawai BKPSDM Kab. Sumenep
Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Data Simpeg BKPSDM Kab. Sumenep Bulan Januari 2019

Dari grafik-grafik tersebut diatas diketahui bahwa secara umum kondisi PNS Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep rata-rata memiliki kemampuan yang cukup baik, hal ini

dapat dilihat berdasarkan golongan yang menunjukkan bahwa pegawai dengan golongan III merupakan golongan terbanyak yaitu 34 orang dengan persentase 53,13% dari jumlah total pegawai sebanyak 64 orang, untuk golongan IV sebanyak 7 orang dengan persentase 10,94% dan untuk golongan II sebanyak 23 orang dengan persentase 35,94%.

Sedangkan jika dilihat dari tingkat pendidikan yaitu sebanyak 21 orang berpendidikan Sarjana (S1) dan 16 orang berpendidikan Magister/Pasca Sarjana (S2), sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki PNS di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah cukup baik.

Demikian juga jika dikaitkan dengan isu pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*), maka perbandingan jumlah pegawai laki-laki dan perempuan yang menduduki Eselon menunjukkan angka yang cukup proporsional dan berimbang yaitu 57,14% pegawai laki-laki dan 42,86% pegawai perempuan.

Selain itu, dukungan sarana dan prasarana merupakan alat paling utama yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepegawaian. Kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai sangat mendukung dalam memberikan pelayanan publik yang baik. Data sarana dan prasarana/asset Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep sampai akhir 31 Desember 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana BKPSDM Kab. Sumenep

No.	Jenis Aset	Jumlah	Keterangan
I.	Peralatan dan Mesin :	5 buah	Baik
	1. Alat-alat Berat	28 unit	Baik
	2. Alat-Alat Angkutan		
	3. Alat Bengkel dan Alat Ukur	22 buah	Baik
	4. Alat Pertanian dan Pertenakan	4 buah	Baik
	5. Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.883 buah	Baik
	6. Alat Studio dan Alat Komunikasi	91 buah	Baik
	7. Alat Laboratorium	1 unit	Baik
II.	Gedung dan Bangunan :		
	1. Bangunan Gedung	14 bangunan	Baik
III.	Jalan, Irigasi dan Jaringan :		
	1. Instalasi	6 kali	Baik
IV	Aset Tetap lainnya :		
	1. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	2 buah	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep selama kurun waktu 2016 – 2018 dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Sumenep
Tahun 2016-2018

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase akurasi updating data kepegawaian	-	-	-	80	80	80	85	85	85	91	92	99	-	-	-	118	115	124	-	-	-
2	Persentase ASN yang lulus diklat dalam satu tahun	-	-	-	90	90	90	90	90	90	100	97	91	-	-	-	111	108	94	-	-	-
3	Persentase Penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi	-	-	-	85	85	85	90	90	95	101	95,5	91	-	-	-	119	112	107	-	-	-
4	Prosentase aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam SOTK	-	-	-	87	89	91	93	94	95	92	96	97	-	-	-	106	108	107	-	-	-
5	Persentase Pelanggaran Disiplin ASN	-	-	-	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,39	0,26	0,36	-	-	-	51	76,9	55	-	-	-
6	Persentase Ketepatan waktu Kenaikan Pangkat PNS	-	-	-	85	85	85	90	90	90	99	53	51	-	-	-	116	62	60	-	-	-

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKPSDM Kabupaten Sumenep

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.228.391.600	1.230.436.100	1.184.993.000	-	-	-	1.139.249.920	1.050.485.571	965.035.877	-	-	-	93%	85%	81%	-	-	-	0,02%	0,08%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	561.763.200	406.173.200	515.865.200	-	-	-	556.348.400	346.514.133	499.903.346	-	-	-	99%	85%	96%	-	-	-	0,003%	0,03%
Program Peningkatan Disiplin Pegawai	-	-	45.019.000	-	-	-	-	-	44.994.000	-	-	-	-	-	99%	-	-	-	0%	0%
Program Peningk. Pengemb. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	67.975.000	67.975.000	67.975.000	-	-	-	67.975.000	67.975.000	62.855.350	-	-	-	100%	100%	92%	-	-	-	0%	0,04%
Program Pelaksanaan Hari - Hari Nasional	-	32.535.000	37.415.250	-	-	-	-	28.335.000	20.548.250	-	-	-	-	87%	55%	-	-	-	0,15%	0,27%

Program Peningkatan Informasi Pembangunan	-	-	25.000.000	-	-	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	0%	0%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.882.913.950	2.151.732.250	-	-	-	-	1.826.497.450	1.977.276.109	-	-	-	-	97%	98%	-	-	-	-	0,43%	0,46%
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2.347.045.610	3.957.210.350	-	-	-	-	2.288.843.920	3.248.078.851	-	-	-	-	98%	82%	-	-	-	-	0,69%	0,42%
Program Pelayanan Informasi Data Kepegawaian	323.673.400	1.364.607.400	467.048.400	-	-	-	323.589.900	1.188.510.500	462.127.400	-	-	-	100%	87%	98%	-	-	-	1,28%	1,03%
Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur Daerah			3.501.321.800	-	-	-	-	-	3.462.876.851	-	-	-	-	-	98%	-	-	-	0%	0%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terdapat faktor-faktor eksternal yang mendukung dan juga menghambat. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari inovasi baru dan alternatif-alternatif terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

1. Tantangan

Ada beberapa faktor penghambat yang menjadi tantangan dalam reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik menuntut pelayanan yang profesional bagi semua Perangkat Daerah. Untuk mencapai hal tersebut maka tantangan yang dihadapi sebagai berikut :

a. Peningkatan Integritas dan Profesionalisme ASN;

Upaya peningkatan integritas dan profesionalisme ASN menjadi tantangan yang akan dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep sebagai lembaga yang mempunyai wewenang dalam peningkatan integritas dan profesionalisme ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, sehingga dalam upaya peningkatan pelayanan publik dapat berjalan secara optimal.

b. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas ASN;

Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur sipil negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep mendesak untuk dilaksanakan agar tetap mampu meningkatkan keterampilan, pengetahuan, keahlian dan perilaku yang terus berkembang

terutama dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

- c. Penempatan ASN belum sesuai kompetensi; Penempatan aparatur sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep harus sesuai dengan kompetensinya sehingga diharapkan pegawai dalam bekerja lebih professional.

2. Peluang

Adapun beberapa faktor pendukung yang diharapkan menjadi peluang adalah sebagai berikut :

- a. Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil;
- b. Penerapan dan pengembangan sistem karier berdasarkan kinerja.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep secara umum memiliki tugas pokok dan fungsi mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia serta tugas pembantuan mulai dari perencanaan formasi, pendidikan dan pelatihan sampai dengan purna tugas.

Dinamika perkembangan lingkungan yang semakin modern dapat memberikan pengaruh terhadap perencanaan strategis yang merupakan tantangan dan sekaligus peluang pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dalam pengembangan pelayanan sebagai berikut :

a. Faktor Kekuatan Organisasi

- 1) Kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dalam menyelenggarakan pelayanan

manajemen aparatur sipil negara di daerah khususnya dibidang penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua serta perlindungan telah ditetapkan dalam peraturan.

Tabel 3.1
Rekapitulasi Perpindahan Pegawai
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep

No.	Uraian	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Perpindahan antar Kabupaten/ Kota di Jawa Timur	7	16	16
2.	Antar Provinsi	2	5	7
Jumlah		9	21	23

Sumber Data : Bidang Mutasi Bulan Desember 2018

Tabel 3.2
Rekapitulasi Penjatuhan Hukuman Disiplin
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep

No.	Uraian	Satuan	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS				
	Pelanggaran Disiplin PNS				
	1) Ringan	Kasus	9	-	
	2) Sedang	Kasus	17	11	6
	3) Berat	Kasus	18	3	8
Jumlah			44	14	14

Sumber Data : Bidang Formasi dan Pembinaan Bulan Desember 2018

Tabel 3.3
Rekapitulasi Data Pengembangan
Kompetensi SDM Aparatur
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep

No.	Uraian	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ujian Dinas	-	-	-
2.	Ujian Penyesuaian Ijazah (KPPI)	-	-	-
3.	Tugas Belajar D3, S1, S2, S3	6	5	2
4.	Izin Belajar	125	58	106
	Jumlah	131	63	108

Sumber Data : Bidang Formasi dan Pembinaan,
Bidang Pengembangan Kompetensi SDM Bulan Desember 2018

Tabel 3.4
Rekapitulasi Data Pengembangan
Kompetensi SDM Aparatur (*Assesment*)
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep

No.	Uraian	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	-	30	-
2.	Jabatan Administrator (Eselon III)	-	8	-
3.	Pelaksana	-	-	202
	Jumlah	-	38	202

Sumber Data : Bidang Mutasi
Bidang Pengembangan Kompetensi SDM Bulan Desember 2018

Tabel 3.5
Rekapitulasi Data Pengembangan Kompetensi SDM
Aparatur (*Diklat Struktural dan Fungsional*)
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep

No.	Uraian	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PNS yang telah mengikuti Diklatpim II, III dan IV	40	40	76
2.	PNS yang telah mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	84	80	115
	Jumlah	124	120	191

Sumber Data : Bidang Pengembangan Kompetensi SDM Bulan Desember 2018

Tabel 3.6
Rekapitulasi Perkembangan Jumlah Pegawai Negeri Sipil
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep

No.	Uraian	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Menurut Golongan	10.453	9.655	9.141
	I	190	180	165
	II	2.570	2.539	2.230
	III	4.577	4.143	4.113
	IV	3.116	2.793	2.633
2.	Menurut Tingkat Pendidikan	10.453	9.655	9.141
	S3	-	-	1
	S2	342	295	527
	S1	4.008	3.481	4.553
	DIV	-	-	-
	DIII	818	1.020	966
	DII	1.521	1.411	505
	DI	59	59	30
	SLTA	3.161	2.903	2.285
	SLTP	275	242	121
	SD	269	244	153
3.	Menurut Jenis Kelamin	10.453	9.655	9.141
	Laki-Laki	7.190	6.542	6.049
	Perempuan	3.263	3.203	3.092
4.	Pejabat Struktural	1.144	1.151	885
	Eselon II	35	36	31
	Eselon III	188	199	203
	Eselon IV	921	916	651
	Eselon V	-	-	-

Sumber Data : Bidang Data dan Informasi Kepegawaian Bulan Desember 2018

- 2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep yang sebelumnya telah menerapkan “Sistem Manajemen Mutu” bertaraf internasional ISO 9001 : 2015 di bidang pendidikan dan pelatihan, memungkinkan seluruh elemen organisasi kembali bertekad mewujudkan penyelenggaraan pelayanan manajemen aparatur yang berbasis sistem teknologi informasi.

- 3) Terjalannya koordinasi yang baik dengan Kementrian/Lembaga Pemerintah Non Departemen lainnya (Kemendagri, Setneg, BKN, PT. Taspen, Bapertarum) dan pemerintah Kabupaten/Kota maupun instansi terkait lainnya.
- 4) Faktor Kelemahan Organisasi
 - 1) Belum Optimalnya penataan sumber daya manusia aparatur yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi untuk mewujudkan profesionalisme ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
 - 2) Belum terbangunnya *merit system* yang mana penilaian kinerja pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep masih belum bisa diukur berdasarkan kompetensi.

2. Lingkungan Eksternal

Identifikasi Lingkungan eksternal yang tidak dapat dikelola secara langsung oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep namun dapat mempengaruhi kinerja organisasi ada dua faktor strategis. Dua faktor strategis lingkungan eksternal yang menjadi tantangan dan peluang organisasi.

a. Faktor Tantangan Organisasi

- 1) Tuntutan reformasi birokrasi melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi untuk pemenuhan standar kompetensi bagi aparatur sipil Negara;

- 2) Pengembangan sumber daya manusia aparatur yang belum terintegrasi dengan sistem pengembangan karier;
- 3) Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga banyak perubahan paradigma tentang sistem pengelolaan manajemen ASN dimana perubahan tersebut memerlukan proses yang berkelanjutan.

b. Faktor Peluang Organisasi

- 1) Meningkatnya kepercayaan dari masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sumenep kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan manajemen sumber daya aparatur terkait dengan seleksi rekrutmen pengadaan calon pegawai negeri sipil yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme melalui sistem *Computer Assisted Test (CAT)* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
- 2) Sistem teknologi informasi dan komputerisasi yang mendukung pelayanan yang prima;
- 3) Semakin kuatnya tuntutan masyarakat terhadap aparatur pemerintah daerah yang professional dan berwawasan global.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Kabupaten Sumenep berpedoman pada arah pembangunan Kabupaten Sumenep sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021 yaitu :

“Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”

Sejalan dengan Visi tersebut di atas, maka Misi Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan;
- 2) Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan;
- 3) Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memperhatikan potensi ekonomi lokal yang unggul berdaya saing tinggi;
- 4) Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang professional dan *Accountable*;
- 5) Meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta *stakeholder* dalam proses pembangunan;
- 6) Meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan, budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat;

Dalam upaya mewujudkan program unggulan misi Bupati Sumenep, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep melaksanakan **Misi ke-4** yaitu: **Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang professional dan *accountabel***". Salah satu tujuan misi ini adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*) serta menjunjung tinggi profesionalisme dalam pelaksanaan pelayanan publik.

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga Terkait dan Renstra Propinsi Jawa Timur

Komitmen Badan Kepegawaian Negara untuk membangun sistem Manajemen PNS dituangkan dalam dalam visi Badan Kepegawaian Negara dalam renstra Tahun 2015-2019 yaitu "Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bertambat Tahun 2025". BKN memiliki peran yang sangat strategis dalam pengelolaan ASN sebagaimana kewenangannya telah jelas tertuang di dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014. Salah satu konsep pembangunan aparatur negara Tahun 2015–2019 yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab BKN diorientasikan pada revitalisasi sistem dan manajemen birokrasi publik secara efisien, responsif, dan berfokus pada pencapaian kinerja, serta pengembangan SDM aparatur sebagai pendorong reformasi. Disamping itu, BKN juga berperan strategis dalam melakukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah melalui pengelolaan hubungan kemitraan dengan BKD daerah dan pembangunan kantor BKN di tingkat regional.

Terdapat tiga isu strategis bidang aparatur negara yang tercantum dalam renstra BKN 2015–2019, yaitu 1) pemerintahan yang bersih dan akuntabel; 2) pemerintahan yang efektif dan efisien; dan 3) peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam menjawab isu-isu strategis tersebut, diperlukan adanya percepatan reformasi birokrasi di berbagai aspek, khususnya aspek internal dan eksternal, aspek pengembangan sistem, dan aspek pengembangan SDM Aparatur. Untuk mencapai sasaran Reformasi Birokrasi sebagaimana disebutkan di atas dibutuhkan perbaikan pada empat faktor utama: Peningkatan Kinerja Pelayanan, Pegawai yang Bersih dan Profesional, Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur, dan Penerapan Sistem Organisasi yang Modern.

Sesuai dengan sasaran Renstra BKD Provinsi Jawa Timur yaitu meningkatnya kualitas SDM aparatur, meningkatnya kualitas data pegawai yang akurat, meningkatnya kompetensi ASN di lingkungan Provinsi Jawa Timur, meningkatnya profesionalisme ASN di lingkungan Provinsi Jawa Timur serta untuk mewujudkan visi misi Kepala Daerah Kabupaten Sumenep, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep melaksanakan kegiatan pembangunan yang mengarah pada pembangunan manajemen sumber daya aparatur sipil Negara sehingga terwujud sumberdaya aparatur yang kompeten dan professional untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Dalam melaksanakan program kegiatan sesuai dengan sasaran renstra BKN dan BKD Provinsi Jawa Timur, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep melaksanakan kegiatannya didukung dengan beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Sumber dana anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Sumenep.
- b. Tersedianya SDM aparatur yang memiliki jenjang jabatan struktural, teknis dan fungsional yang dapat dikembangkan.
- c. Tersedianya sarana prasarana yang terkait dengan pengembangan data base untuk mendukung kualitas informasi dan layanan data kepegawaian.
- d. Tersedianya sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan diklat guna meningkatkan ketrampilan dan profesionalisme aparatur untuk mendukung kualitas pelayanan.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat pelayanan kepegawaian, yaitu:

- a. Terbatasnya ketersediaan SDM aparatur terutama untuk jabatan fungsional yang terkait dengan analis kepegawaian dan programmer.
- b. Kurangnya pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-undangan kepegawaian.
- c. Masih rendahnya budaya kerja pegawai terkait dengan tugas, tanggungjawab, etika dan perilaku pegawai.
- d. Belum diberlakukannya sistem merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara.

3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pengembangan pemanfaatan ruang wilayah Pemerintah Kabupaten Sumenep sangat terkait dengan RTRW Provinsi Jawa Timur, yaitu rencana sistem pusat pelayanan permukiman perdesaan dan perkotaan serta sistem jaringan sarana perwilayahan di Provinsi Jawa Timur. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Sumenep diantaranya adalah pengembangan sistem jaringan sarana prasarana wilayah khususnya pertumbuhan wilayah pedesaan dan perkotaan dimana Kabupaten Sumenep yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan. Ke depan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep akan melaksanakan penataan jaringan pengembangan sarana dan prasarana kepegawaian melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan pengembangan data base elektronik yang terkoneksi dengan perangkat daerah yang ada di wilayah.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Kualitas Kinerja pemerintah daerah perlu untuk ditingkatkan baik dari sisi mental dan etos kerja birokratnya, manajemen kelembagaan dan infrastruktur penunjangnya. Peningkatan etos kerja birokrat dapat dilakukan melalui penerapan disiplin pegawai dan peningkatan kinerja, manajemen kelembagaan dapat ditingkatkan melalui pembenahan tata laksana organisasi sedangkan penguatan infrastruktur pemerintahan dan pelayanan dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi informasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka isu-isu strategis yang harus ditangani Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep

Tahun 2016-2021 secara berkesinambungan untuk mendukung isu strategis daerah yaitu :

1. Penataan SDM aparatur yang belum terdistribusi sesuai formasi kebutuhan dan kompetensi;
2. Evaluasi Kinerja Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Sumenep belum berlandaskan pada sistem penilaian kinerja berbasis *Merit System*;
3. Kompetensi Pegawai Pemerintah Kabupaten Sumenep belum dikembangkan secara optimal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Untuk lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Aparatur yang lebih bersih, profesional dan sejahtera Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep berupaya menyelenggarakan pelayanan manajemen kepegawaian yang berkualitas, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut :

4.1. Tujuan

Dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep ditetapkan tujuan strategis Dalam rangka untuk mewujudkan misi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep ditetapkan tujuan strategis yaitu **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Kepegawaian.**

Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh peningkatan kualitas penataan SDM Aparatur Sipil Negara yang memiliki keahlian, pengetahuan, sikap dan perilaku sesuai dan kebutuhan. Selain itu juga terbentuknya pegawai ASN di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep yang disiplin, integritas, mengedepankan kompetensi yang memadai dan bekerja dengan dedikasi yang tinggi serta dan

berorientasi pada prestasi kerja yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai. Serta didukung dengan sistem informasi database kepegawaian ASN yang terintegrasi dengan penilaian kinerja termasuk peta jabatan dan integrasi sistem aplikasi pencatatan kerja pegawai dengan pengisian dokumen analisis jabatan, analisis beban kerja dan sasaran kerja pegawai.

4.2. Sasaran

Sejalan dengan Reviu RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 pada Misi ke 4 (empat) Sasaran ke 2 (dua) yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah, maka Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep menetapkan indikator sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi dengan sasaran :

1. Meningkatnya Kualitas Penataan SDM ASN sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi, dengan indikator sasaran yaitu :
 - a) Persentase Pemenuhan Kebutuhan Formasi sesuai dengan Kebutuhan;
 - b) Persentase Penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi.
2. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara, dengan indikator sasaran yaitu :
 - a) Persentase ASN yang lulus diklat dalam satu tahun;
 - b) Persentase ASN dengan Nilai SKP yang baik;
 - c) Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai.

3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dibidang Kepegawaian, dengan indikator sasaran yaitu :
 - a) Nilai SKM

Adapun Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran serta target capaian kinerja Jangka Menengah Tujuan disusunnya Review Renstra OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep adalah untuk membangun sebuah Rencana Strategis sebagai pedoman dalam menyusun program dan indikator kinerja 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan kedudukan, tugas dan wewenang yang dilimpahkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya disajikan dalam **Tabel 4.1** sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep
Sebelum Perubahan Renstra

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA/RUMUS	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dibidang Kepegawaian	Nilai SKM	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Kepegawaian	Hasil Survey Kepuasan Aparatur	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat sesuai dg Permenpan & RB Nomor 18 Tahun 2014	76	78	80	83	86	87
			Terwujudnya pengelolaan administrasi kepegawaian yang cepat dan akurat	Persentase Akurasi Updating data kepegawaian	(Jumlah data kepegawaian yg diupdate : jumlah ASN Kab. Sumenep) x 100%	80	80	80	80	85	85
				Persentase Penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi	(Jumlah Penempatan ASN yg memenuhi syarat Kompetensi : Jumlah Jabatan) x 100%	85	85	85	90	90	95
				Persentase Jumlah aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam SOTK	(Jumlah Jabatan Struktural Terisi : Jumlah Jabatan sesuai SOTK) x 100%	87	89	91	93	94	95
				Persentase Ketepatan waktu Kenaikan Pangkat PNS	(Jumlah SK yang terbit : Jumlah Usulan Kenaikan Pangkat) x 100%	90	91	95	95	95	98
				Persentase Tingkat Penanganan Kasus Disiplin ASN	(Jumlah Kasus yang diselesaikan : Jumlah Kasus) x 100%	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
				Persentase Pemenuhan kebutuhan ASN sesuai dengan usulan formasi	(Jumlah Formasi yang ada : jumlah Kebutuhan ASN di Kab. Sumenep) x 100%	n/a	n/a	n/a	50	50	50
				Persentase ASN dengan Nilai SKP yang Baik	(Jumlah ASN dg Predikat Baik : Jumlah ASN di Kab. Sumenep) x 100%	n/a	n/a	n/a	80	80	80
			Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur	Persentase ASN yang lulus diklat dalam Satu Tahun	(Jumlah Peserta Lulus Diklat : Jumlah Peserta semua Diklat) x 100%	90	90	90	90	90	90

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep
Setelah Perubahan Renstra

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA/RUMUS	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dibidang Kepegawaian	Nilai SKM	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Kepegawaian	Hasil SKM	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat sesuai dg Permenpan & RB Nomor 18 Tahun 2014	76	78	80	83	86	87
			Meningkatnya Kualitas Penataan SDM ASN sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi	Persentase Pemenuhan kebutuhan ASN sesuai dengan usulan formasi	(Jumlah Formasi yang ada : jumlah Kebutuhan ASN di Kab. Sumenep) x 100%	n/a	n/a	n/a	50	60	60
				Persentase Penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi	(Jumlah Penempatan ASN yg sesuai Anjab : Jumlah ASN di Lingkungan Pemkab Sumenep) x 100%	85	85	85	90	90	95
				Persentase Jumlah aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam SOTK	(Jumlah Jabatan Struktural Terisi : Jumlah Jabatan sesuai SOTK) x 100%	87	89	91	93	94	95
			Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	Persentase ASN yang lulus diklat dalam Satu Tahun	(Jumlah Peserta Lulus Diklat : Jumlah Peserta semua Diklat) x 100%	90	90	90	90	90	90
				Persentase ASN dengan Nilai SKP yang Baik	(Jumlah ASN yg memiliki Nilai antara 76 s/d 100 : Jumlah ASN di Kab. Sumenep) x 100%	n/a	n/a	n/a	80	80	80
				Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai	(Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin : Jumlah ASN di Kab. Sumenep) x 100%	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

4.2. Tujuan dan Sasaran Pendukung

Selain mempunyai tujuan dan strategis, Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep juga mempunyai tujuan dan sasaran pendukung yang mana untuk mengakomodir tugas dan fungsi administratif pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

Tujuan Penunjang adalah terlaksananya Fungsi Administratif Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep, sedangkan **Sasaran Penunjang** adalah Meningkatnya Pelayanan Fungsi Administrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mengacu pada misi RPJMD ke 4 yaitu **Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang professional dan *accountable***. Terkait dengan misi tersebut maka tujuan yang ditetapkan adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kepegawaian. Dengan sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Penataan SDM ASN sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi;
2. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara;
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dibidang Kepegawaian.

Dalam rangka mewujudkan misi, tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renstra pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 disusun strategi sebagai berikut :

1. Strategi

- a) Pendistribusian dan Penataan SDM aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep sesuai hasil pemetaan;
- b) Pengembangan Manajemen Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
- c) Peningkatan Kualitas ASN yang mempunyai kriteria disiplin, integritas, komitmen dan berkinerja tinggi.

2. Kebijakan

- a) Penataan dan Pendistribusian SDM aparatur yang disesuaikan formasi kebutuhan dan kompetensi yang telah ditetapkan melalui hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- b) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dan Pola Karier ASN mulai dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sampai dengan Jabatan Pelaksana;
- c) Peningkatan disiplin, interitas, komitmen dan kinerja pegawai ASN melalui penegakan peraturan disiplin dan kode etik.

Untuk lebih jelas pemahaman tujuan, sasaran, dan strategi/kebijakan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep pada Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada matrik dibawah ini :

Tabel 5.1**Tujuan, Sasaran, Dan Strategi/Kebijakan**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Bidang Kepegawaian	Meningkatnya Kualitas Penataan SDM ASN sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi	Pendistribusian dan Penataan SDM aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep sesuai hasil pemetaan	Penataan dan Pendistribusian SDM aparatur yang disesuaikan formasi kebutuhan dan kompetensi yang telah ditetapkan melalui hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja
	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	Pengembangan Manajemen Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dan Pola Karier ASN mulai dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sampai dengan Jabatan Pelaksana
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Kepegawaian	Peningkatan Kualitas ASN yang mempunyai kriteria disiplin, integritas, komitmen dan berkinerja tinggi	Peningkatan disiplin, interitas, komitmen dan kinerja pegawai ASN melalui penegakan peraturan disiplin dan kode etik

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan arah kebijakan diperlukan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dan dijabarkan ke dalam program-program pembangunan dan kegiatan-kegiatan utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

6.1 Program dan Kegiatan

Salah satu agenda pokok yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan *accountable*. Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan, perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program dari Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 ke dalam program-program pembangunan, yaitu program wajib dan program pendukung sebagai berikut :

Program Wajib dalam Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :

6.1.1. Program Wajib

1. Program Penyusunan Formasi dan Pengadaan ASN

Program Penyusunan Formasi dan Pengadaan ASN diarahkan untuk mewujudkan tujuan dan

sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep. Indikator kinerja program atau *outcome* program ini adalah persentase hasil seleksi ASN sesuai dengan kebutuhan dan formasi, dengan kegiatan dan indikator kinerja kegiatan atau *output* sebagai berikut :

a. Penyusunan Formasi dan Kebutuhan ASN

Indikator kinerja atau *output* kegiatan ini adalah jumlah data kebutuhan ASN sesuai formasi.

b. Seleksi penerimaan calon ASN

Indikator kinerja atau *output* kegiatan ini adalah jumlah pelaksanaan seleksi ASN.

2. Program Peningkatan Disiplin ASN

Program Penyusunan Formasi dan Pengadaan ASN diarahkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep. Indikator kinerja program atau *outcome* program ini adalah persentase nilai SKP yang baik, persentase jumlah pelanggaran disiplin dan persentase penerima tambahan penghasilan pegawai, dengan kegiatan dan indikator kinerja kegiatan atau *output* sebagai berikut :

a. Penilaian Kinerja Aparatur

Indikator kinerja atau *output* kegiatan ini adalah jumlah ASN dengan nilai SKP Baik.

b. Pembinaan Aparatur

Indikator kinerja atau *output* kegiatan ini adalah jumlah kasus pelanggaran disiplin terselesaikan.

c. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai

Indikator kinerja atau *output* kegiatan ini adalah jumlah penerima tambahan penghasilan pegawai.

3. Program Pengelolaan Administrasi Mutasi ASN

Program Penyusunan Formasi dan Pengadaan ASN diarahkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep.

Indikator kinerja program atau *outcome* program ini adalah persentase penempatan ASN yang sesuai dengan analisis jabatan, dengan kegiatan dan indikator kinerja kegiatan atau *output* sebagai berikut :

a. Penataan ASN

Indikator kinerja atau *output* kegiatan ini adalah jumlah jabatan terisi sesuai kompetensi.

b. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

Indikator kinerja atau *output* kegiatan ini adalah jumlah SK Kenaikan pangkat yang diterbitkan tepat waktu.

c. Pengembangan Karir dan Promosi Aparatur

Indikator kinerja atau *output* kegiatan ini adalah jumlah seleksi dan uji kompetensi yang dilaksanakan.

4. Program Pelayanan Informasi Data Kepegawaian

Program Pelayanan Informasi Data Kepegawaian diarahkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep.

Indikator kinerja program atau *outcome* program ini adalah persentase pelaksanaan updating data dan penyampaian informasi kepegawaian dengan kegiatan dan indikator kinerja kegiatan atau *output* sebagai berikut :

a. Pengelolaan Data Kepegawaian

Indikator kinerja atau *output* kegiatan ini adalah jumlah kelompok data yang di update.

b. Pengembangan Informasi Kepegawaian

Indikator kinerja atau *output* kegiatan ini adalah jumlah penyampaian informasi kepegawaian mengenai daftar urut kepangkatan, buku profil BKPSDM dan buku peraturan.

c. Proses Administrasi Pemberhentian ASN

Indikator kinerja atau *output* kegiatan ini adalah jumlah SK Pemberhentian ASN.

d. Fasilitasi Profesi Jiwa Korps ASN

Indikator kinerja atau *output* kegiatan ini adalah jumlah peserta fasilitasi profesi jiwa korps ASN.

5. Program Pengembangan Kompetensi SDM

Program Pengembangan Kompetensi SDM diarahkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep.

Indikator kinerja program atau *outcome* program ini adalah adalah persentase peserta lulus pendidikan dan pelatihan dengan kegiatan dan indikator kinerja kegiatan atau *output* sebagai berikut :

a. Pengembangan Kompetensi SDM Manajerial

Indikator kinerja atau *output* kegiatan ini adalah jumlah peserta yang lulus mengikuti diklat Kompetensi SDM Manajerial.

b. Pengembangan Kompetensi SDM Teknis dan Fungsional

Indikator kinerja atau *output* kegiatan ini adalah jumlah peserta yang lulus mengikuti diklat Kompetensi SDM Teknis dan Fungsional.

c. Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur

Indikator kinerja atau *output* kegiatan ini adalah jumlah peserta yang lulus kompetensi.

6.1.2. Program Pendukung

1. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi merupakan program pendukung dalam rangka pencapaian tujuan pelayanan administrasi. Program ini untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran sebagai sarana penunjang pelayanan publik di bidang kepegawaian. Indikator kinerja program atau *outcome* program ini adalah persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah dan indikator kinerja kegiatan atau *output* sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator kinerja atau *output* kegiatan ini adalah jumlah surat menyurat yang administrasikan.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator kinerja atau *output* kegiatan ini adalah jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

c. Penyediaan Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor

Indikator kinerja atau *output* kegiatan ini adalah jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor.

d. Penyediaan Kebutuhan Bahan Perkantoran

Indikator kinerja atau *output* kegiatan ini adalah jumlah bahan perkantoran yang disediakan selama 1 tahun anggaran.

e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator kinerja atau *output* kegiatan ini adalah jumlah komponen listrik yang diadakan.

f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Indikator kinerja atau *output* kegiatan ini adalah jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan.

g. Penyediaan Makanan dan Minuman

Indikator kinerja atau *output* kegiatan ini adalah jumlah tersedianya makanan dan minuman.

h. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Indikator kinerja atau *output* kegiatan ini adalah jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi.

i. Peringatan Hari-Hari Besar

Indikator kinerja atau *output* kegiatan ini adalah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan.

j. Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran

Indikator kinerja atau *output* kegiatan ini adalah jumlah layanan perkantoran yang disediakan.

k. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas

Indikator kinerja atau *output* kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli.

l. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas

Indikator kinerja atau *output* kegiatan ini adalah jumlah gedung kantor yang dipelihara.

m. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Indikator kinerja atau *output* kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara.

n. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas

Indikator kinerja atau *output* kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur merupakan program pendukung dalam rangka pencapaian tujuan pelayanan administrasi. Program ini untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran sebagai sarana penunjang pelayanan publik di bidang kepegawaian. Indikator kinerja program atau *outcome* program ini adalah persentase penunjang

kerja aparatur dan indikator kinerja kegiatan atau *output* sebagai berikut :

a. Pengelolaan dan Peningkatan Disiplin

Dengan Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Olah Raga, Indikator kinerja atau *output* kegiatan ini adalah jumlah penyediaan pakaian olah raga.

3. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan program pendukung pelayanan kepegawaian, dengan memberikan penilaian/evaluasi program dan kegiatan, identifikasi permasalahan program dan kegiatan. Indikator kinerja program atau *outcome* program ini adalah persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu dan indikator kinerja kegiatan atau *output* sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Keuangan

Indikator kinerja atau *output* kegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu.

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja atau *output* kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu.

6.2 Kelompok Sasaran

Yang menjadi kelompok sasaran dari beberapa program kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 tentunya adalah Masyarakat dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai pemakai jasa layanan kepegawaian.

6.3. Pendanaan Indikatif

Untuk mendukung pelaksanaan atau implementasi dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan, ada factor yang sangat diperlukan yaitu pendanaan. Untuk mewujudkan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep, Pemerintah Kabupaten Sumenep bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep untuk pengalokasian sumber Dana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Tersaji dalam Tabel 6.12 dibawah ini :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2018

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di bidang Kepegawaian	Nilai SKM	Meningkatnya Kualitas Penataan SDM ASN sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN sesuai dengan usulan formasi	.08.01.16	Program Pelayanan Informasi Data Kepegawaian	Persentase Pelaksanaan updating data dan penyampaian informasi kepegawaian	-	80%	323.673.400	80%	364.60.7400	80%	467.048.400	80%	2.155.329.200	BKPSDM	Kab. Sumenep
				6.003	Validasi Data Kepegawaian	Jumlah data dan informasi Kepegawaian yang lengkap, tepat dan aktual	-	11.500 Orang	71.326.300	10.500 Orang	71.326.300	9.269 Orang	71.326.300	9.269 Orang	213.978.900	BKPSDM	Kab. Sumenep
				16.005	Penyusunan Tata Naskah Kepegawaian Elektronik	Jumlah scanning file perorangan	-	2.300 Berkas	96.336.800	2.300 Berkas	96.336.800	2.300 Berkas	96.336.800	6.900 Berkas	289.010.400	BKPSDM	Kab. Sumenep
				16.012	Penyelenggaraan Sistem Informasi Absensi Pegawai (SIAGA)	Jumlah Sistem Informasi Absensi Pegawai	-	-	-	59 OPD	81.959.1500	-	-	9 OPD	81.959.1500	BKPSDM	Kab. Sumenep
				16.001	Penyediaan Data Informasi Kepegawaian	Jumlah data dan informasi daftar urut kepegawaian dan bezetting pegawai	-	11.500 Orang	98.119.300	10.500 Orang	98.119.300	9.269 Orang	98.119.300	9.269 Orang	294.357.900	BKPSDM	Kab. Sumenep
				16.014	Penyediaan Informasi Identitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Jumlah Identitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)	-	-	-	10.500 Orang	221.342.500	-	-	10.500 Orang	221.342.500	BKPSDM	Kab. Sumenep
				16.006	Pembangunan Sistem Pelayanan Kepegawaian Terpadu Bersertifikat ISO 9001 : 2008	Jumlah Pelayanan Kepegawaian Terpadu Bersertifikasi ISO 9001-2008	-	1 Paket	57.891.000	1 Paket	57.891.000	1 Paket	57.891.000	Paket	173.673.000	BKPSDM	Kab. Sumenep
				16.011	Penyelenggaraan Sistem Informasi Layanan Harian Kepegawaian (SILAHKAN)	Jumlah Informasi Layanan Harian Kepegawaian (SILAHKAN)	-	-	-	-	-	161 OPD	143.375.000	61 OPD	143.375.000	BKPSDM	Kab. Sumenep

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Persentase Penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi	3.08.01.15	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Penempatan ASN yang sesuai dengan Analisis Jabatan	-	85%	445.977.900	85%	1.382.898.400	85%	1.033.135.800	85%	2.862.012.100	BKPSDM	Kab. Sumenep
				15.022	Evaluasi dan Pelaporan Baperjakat	Jumlah Baperjakat	-	6 Orang	63.275.000	6 Orang	63.275.000	6 Orang	63.275.000	18 Orang	189.825.000	BKPSDM	Kab. Sumenep
				15.025	Pelantikan Pejabat Struktural dan Fungsional	Jumlah pejabat struktural dan fungsional yang dilantik	-	600 Orang	76.050.900	600 Orang	76.050.900	600 Orang	188.693.000	1.800 Orang	340.794.800	BKPSDM	Kab. Sumenep
				15.026	Proses Pengangkatan CPNS menjadi PNS	Jumlah SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS	-	40 PNS	6.520.300	60 PNS	-	250 PNS	6.520.300	-	13.040.600	BKPSDM	Kab. Sumenep
				15.023	Pelaksanaan Sumpah Dan Janji PNS	Jumlah Peserta Sumpah PNS	-	400 Orang	68.811.300	150 Orang	29.324.000	-	-	550 Orang	98.135.300	BKPSDM	Kab. Sumenep
				15.027	Proses Peninjauan Masa Kerja	Jumlah SK Peninjauan Masa Kerja PNS	-	20 ASN	7.172.300	20 ASN	7.172.300	20 ASN	7.172.300	60 ASN	21.516.900	BKPSDM	Kab. Sumenep
				15.024	Proses Administrasi Pensiun ASN	Jumlah proses Administrasi Pensiun	-	351 Orang	49.266.900	392 Orang	49.266.900	442 Orang	75.034.500	1.185 Orang	173.568.300	BKPSDM	Kab. Sumenep
				15.028	Penyerahan SK. Pensiun PNS secara Simbolis	Jumlah Penyerahan SK. Pensiun PNS Simbolis	-	250 PNS	63.530.000	250 PNS	63.530.000	250 PNS	70.280.000	750 ASN	197.340.000	BKPSDM	Kab. Sumenep
				15.030	Seleksi Pengisian JPT Pratama di Lingkungan Pemkab. Sumenep	Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Pengisian	-	-	-	40 ASN	700.313.100	40 ASN	510.809.500	80 ASN	1.211.122.600	BKPSDM	Kab. Sumenep
				15.031	Uji Kompetensi dlm rangka Pemetaan JPT Pratama di Lingkungan Pemkab. Sumenep	Jumlah peserta yang mengikuti Uji Kompetensi	-	-	-	36 ASN	282.615.000	-	-	36 ASN	282.615.000	BKPSDM	Kab. Sumenep
				15.020	Proses Administrasi Kenaikan Pangkat	Jumlah Kenaikan Pangkat PNS	-	2.600 Orang	111.351.200	2.600 Orang	111.351.200	2.600 Orang	111.351.200	7.800 Orang	334.053.600	BKPSDM	Kab. Sumenep
		Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	Persentase ASN yang lulus diklat dalam satu satu	3.09.308.01.15	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peserta Lulus Diklat	-	90%	1.882.913.950	90%	2.001.803.550	90%	3.501.321.800	90%	7.386.039.300	BKPSDM	Kab. Sumenep
				15.001	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah	Jumlah peserta Diklat Prajabatan	-	-	-	-	-	101 Orang	769.500.000	101 Orang	769.500.000	BKPSDM	Kab. Sumenep

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				15.004	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II bagi Pejabat Eselon II PNS Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat PIM II	-	-	-	-	-	12 Orang	210.254.700	12 Orang	210.254.700	BKPSDM	Kab. Sumenep
				15.005	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III bagi PNS Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat PIM III	-	-	-	-	-	30 Orang	759.058.000	30 Orang	759.058.000	BKPSDM	Kab. Sumenep
				15.006	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV bagi PNS Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti diklat PIM IV	-	30 Orang	761.971.300	40 Orang	773.965.800	40 Orang	815.856.500	110 Orang	2.351.793.600	BKPSDM	Kab. Sumenep
				15.003	Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti diklat	-	50 Orang	109.537.600	50 Orang	199.833.550	50 Orang	109.537.600	150 Orang	418.908.750	BKPSDM	Kab. Sumenep
				15.027	Bimbingan Teknis Penyelesaian Adm. Kenaikan Pangkat PNS	Jumlah peserta yang mengikuti diklat	-	200 Orang	105.612.500	200 Orang	105.612.500	-	-	400 Orang	211.225.000	BKPSDM	Kab. Sumenep
				15.037	Bimbingan Teknis Penanganan Kasus-Kasus Kepegawaian	Jumlah peserta yang mengikuti diklat	-	100 Orang	169.388.000	-	-	-	-	100 Orang	169.388.000	BKPSDM	Kab. Sumenep
				15.007	Profesi Kepamongpraajaan	Jumlah peserta yang mengikuti diklat	-	5 Orang	203.000.000	-	-	-	-	5 Orang	203.000.000	BKPSDM	Kab. Sumenep
				15.021	Diklat Akreditasi Puskesmas Angkatan I dan II di Kabupaten Sumenep	Jumlah peserta yang mengikuti diklat	-	-	-	80 Orang	718.505.700	-	-	80 Orang	718.505.700	BKPSDM	Kab. Sumenep
				15.059	Diklat Pengelolaan Pariwisata Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti diklat	-	-	-	-	-	40 Orang	460.185.500	40 Orang	460.185.500	BKPSDM	Kab. Sumenep
				15.009	Capacity building dan strategi peningkatan kualitas SDM Organisasi	Jumlah peserta yang mengikuti diklat	-	-	-	-	-	75 Orang	376.929.500	75 Orang	376.929.500	BKPSDM	Kab. Sumenep
				15.036	Fasilitasi Pengembangan Bakat Seni, Budaya, Mental dan Rohani bagi Anggota Korpri	Jumlah Pelaksanaan Bakat Seni, Budaya, Mental dan Rohani bagi Anggota Korpri	-	-	-	2 Kegiatan	204.166.850	-	-	2 Keg	204.166.850		
				15.037	Penyelenggaraan Pekan Olahraga Anggota Korpri	Jumlah Pelaksanaan Pekan Olahraga Anggota Korpri	-	-	-	1 Kegiatan	45.220.700	-	-	1 Keg	45.220.700		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Persentase ASN dengan Nilai SKP yang Baik	3.08.01.15	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Nilai SKP yang Baik										BKPSDM	Kab. Sumenep
				15.035	Peningkatan Kinerja Aparatur	Jumlah Satker yang di evaluasi	-	170 OPD	308.594.000	161 OPD	308.594.000	161 OPD	308.594.000	161 OPD	925.782.000	BKPSDM	Kab. Sumenep
				15.013	Sosialisasi Elektronik Sasaran Kerja Pegawai (E-SKP)	Jumlah peserta yang mengikuti diklat	-	-	-	168 Orang	203.886.000	-	-	168 Orang	203.886.000	BKPSDM	Kab. Sumenep
			Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai	3.08.01.15	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase SK Sanksi yang diterbitkan	-	0,20%	1.901.067.710	0,20%	2.724.240.650	0,20%	2.748.409.600	0,20%	7.373.717.960	BKPSDM	Kab. Sumenep
				15.002	Penyelesaian Kasus-Kasus Kepegawaian	Jumlah penanganan kasus dan disiplin	-	30 Kasus	35.140.500	30 Kasus	130.270.500	30 Kasus	130.270.500	30 Kasus	295.681.500	BKPSDM	Kab. Sumenep
				15.006	Proses Pelaporan LHKPN	Jumlah pelapor LHKPN	-	75 Orang	14.877.000	75 Orang	14.877.000	75 Orang	14.877.000	225 Orang	44.631.000	BKPSDM	Kab. Sumenep
				15.008	Proses Pengisian dan Penyampaian LP2P	Jumlah PNS Wajib Pajak	-	6.000 Orang	47.536.210	6.000 Orang	46.416.000	6.000 Orang	46.416.000	18.000 Orang	140.368.210	BKPSDM	Kab. Sumenep
				15.004	Proses Penyelesaian Karis/Karsu, Taspen dan Karpeg	Jumlah kebutuhan administrasi Karis/Karsu, Taspen dan Karpeg	-	500 Kartu	17.558.000	500 Kartu	17.558.000	500 Kartu	17.558.000	1.500 Kartu	52.674.000	BKPSDM	Kab. Sumenep
				15.009	Proses Usul dan Penetapan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya	Jumlah Penerima Tanda Kehormatan SATYALANCANA KARYA SATYA	-	150 Orang	39.836.600	150 Orang	68.509.200	150 Orang	68.509.200	450 Orang	176.855.000	BKPSDM	Kab. Sumenep
				15.010	Biaya Administrasi Penyerahan Tambahan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil	Jumlah Penerima Tambahan Kesejahteraan PNS	-	11.500 ASN	32.613.500	10.500 ASN	32.613.500	9.633 ASN	32.613.500	9.633 ASN	97.840.500	BKPSDM	Kab. Sumenep
				15.003	Penataan Administrasi dan Monitoring Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Pemberian Gaji/upah bagi PTT	-	79 PTT	287.991.000	79 PTT	289.816.000	35 PTT	289.816.000	35 PTT	867.623.000	BKPSDM	Kab. Sumenep
				15.012	Pemberian insentif bagi Tenaga Honorar (eks. K2)	Jumlah Penerima insentif Tenaga Honorar (eks K2)	-	359 PHL	1.069.034.500	359 PHL	1.530.307.000	345 PHL	1.713.235.000	345 PHL	4.312.576.500	BKPSDM	Kab. Sumenep
				15.016	Biaya Administrasi Diklat Pra Jabatan	Jumlah Penerima Bantuan Prajab	-	40 Orang	17.109.000	-	-	502 Orang	89.028.500	542 Orang	106.137.500	BKPSDM	Kab. Sumenep
				15.015	Proses Administrasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar	Jumlah Adm. Tugas dan Ijin Belajar	-	250 Orang	30.777.400	250 Orang	35.891.900	250 Orang	37.491.900	750 Orang	104.161.200	BKPSDM	Kab. Sumenep

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				3.08.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Kecukupan Penyediaan Jasa kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	100%	1.228.391.600	100%	1.205.436.100	100%	1.248.315.000	100%	3.682.142.700	BKPSDM	Kab. Sumenep
				01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	-	15.000 Surat	22.460.950	15.000 Surat	35.593.950	15.000 Surat	35.593.950	45.000 Surat	93.648.850	BKPSDM	Kab. Sumenep
				01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Pemakaian Telepon, air dan listrik	-	12 Bulan	378.988.000	12 Bulan	399.155.000	12 Bulan	426.155.000	36 Bulan	1.204.298.000	BKPSDM	Kab. Sumenep
				01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	-	1.490 Orang	23.860.800	1.490 Orang	23.860.800	1.490 Orang	23.860.800	4.470 Orang	71.582.400	BKPSDM	Kab. Sumenep
				01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak yang tersedia	-	39.597 Cetak	80.883.000	39.597 Cetak	89.335.000	39.597 Cetak	89.335.000	118.791 Cetak	259.553.000	BKPSDM	Kab. Sumenep
				01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor	-	Paket	186.930.000	-	-	-	-	1 Paket	186.930.000	BKPSDM	Kab. Sumenep
				01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Ketersediaan Alat Rumah Tangga	-	80 Unit	168.712.850	90 Unit	261.300.350	105 Unit	277.179.250	105 Unit	707.192.450	BKPSDM	Kab. Sumenep
				01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Surat Kabar dan Majalah	-	194 Unit	30.275.000	194 Unit	32.375.000	194 Unit	32.375.000	582 Unit	95.025.000	BKPSDM	Kab. Sumenep
				01.016	Penyediaan Makanan dan Minuman	Ketersediaan Surat Kabar dan Majalah	-	1.320 Orang	20.700.000	1.320 Orang	36.300.000	1.320 Orang	36.300.000	3.960 Orang	93.300.000	BKPSDM	Kab. Sumenep
				01.017	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Volume Rakor dan Konsultasi	-	208 Kali	183.800.000	208 Kali	192.735.000	208 Kali	192.735.000	624 Kali	569.270.000	BKPSDM	Kab. Sumenep
				01.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Volume Rakor dan Konsultasi	-	51 Kali	5.350.000	51 Kali	8.350.000	51 Kali	8.350.000	153 Kali	22.050.000	BKPSDM	Kab. Sumenep
				01.020	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Layanan Administrasi Kepegawaian	-	57 Satker	126.431.000	57 Satker	126.431.000	57 Satker	126.431.000	171 Satker	379.293.000	BKPSDM	Kab. Sumenep
				3.08.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Nilai Aset dalam Kondisi Baik	-	100%	561.763.200	100%	406.173.200	100%	515.865.200	300%	1.483.801.600	BKPSDM	Kab. Sumenep
				02.035	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	-	1 Unit Mobil	195.000.000	-	-	-	-	1 Unit Mobil	195.000.000	BKPSDM	Kab. Sumenep
				02.038	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara	-	2 Lokasi	148.750.000	2 Lokasi	159.750.000	2 Lokasi	159.750.000	2 Lokasi	468.250.000	BKPSDM	Kab. Sumenep
				02.040	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang Tersedia Terawat	-	17 Unit	98.013.200	17 Unit	121.623.200	17 Unit	121.623.200	17 Unit	341.259.600	BKPSDM	Kab. Sumenep

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				02.044	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	-	1 Paket	120.000.000	1 Paket	124.800.000	1 Paket	124.800.000	3 Paket	369.600.000	BKPSDM	Kab. Sumenep
				02.058	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	-	1 Lokasi	-	1 Lokasi	-	1 Lokasi	109.692.000	3 Lokasi	109.692.000	BKPSDM	Kab. Sumenep
				3.08.01.03	Program Peningkatan Disiplin Pegawai	Persentase Peningkatan Disiplin ASN	-	-	-	-	-	100%	45.019.000	300%	45.019.000	BKPSDM	Kab. Sumenep
				03.005	Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu	Ketersediaan Pakaian untuk PNS	-	-	-	-	-	1 Paket	45.019.000	1 Paket	45.019.000	BKPSDM	Kab. Sumenep
				3.08.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan pelaporan capain kinerja dan keuangan	-	100%	67.975.000	100%	67.975.000	100%	67.975.000	300%	203.925.000	BKPSDM	Kab. Sumenep
				06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah Laporan	-	7 Dok	11.376.000	7 Dok	11.376.000	7 Dok	11.376.000	21 Dok	34.128.000	BKPSDM	Kab. Sumenep
				06.004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah SPJ	-	12 Berkas	43.568.000	12 Berkas	43.568.000	12 Berkas	43.568.000	36 Berkas	130.704.000	BKPSDM	Kab. Sumenep
				06.007	Penyusunan RKA dan DPA OPD	Jumlah Dokumen Pelaksana Anggaran dan OPD	-	2 Dok	13.031.000	2 Dok	13.031.000	2 Dok	13.031.000	6 Dok	39.093.000	BKPSDM	Kab. Sumenep
				3.08.01.07	Program Pelaksanaan Hari-Hari Nasional	Prosentase Pelaksanaan Hari-Hari Nasional	-	-	-	100%	32.535.000	100%	37.415.250	300%	69.950.250	BKPSDM	Kab. Sumenep
				07.016	Peringatan HUT KORPRI	Jumlah Pelaksanaan HUT KORPRI	-	-	-	1 Keg	32.535.000	1 Keg	37.415.250	2 Keg	69.950.250	BKPSDM	Kab. Sumenep
				3.08.01.08	Program Peningkatan Informasi Pembangunan	Persentase Peningkatan Informasi Pembangunan	-	100%	30.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	300%	80.000.000	Sekretariat	BKPSDM
				08.001	Pameran Pembangunan	Jumlah Pentas Seni	-	1 Paket	30.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	Paket	80.000.000	Sekretariat	BKPSDM

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2019 – 2021**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di bidang Kepegawaian	Nilai SKM	Meningkatnya Kualitas Penataan SDM ASN sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN sesuai dengan usulan formasi	4.05.01.18	Program Penyusunan Formasi dan Pengadaan ASN	Persentase hasil seleksi sesuai dengan kebutuhan formasi	-	50%	2.558.944.500	50%	2.814.838.950	50%	3.096.322.845	50%	8.470.106.295	BKPSDM	Kab. Sumenep
				01.18.01	Penyusunan Kebutuhan dan Formasi ASN	Jumlah Data Kebutuhan dan Formasi ASN	-	1 Product	143.284.000	1 Product	157.612.400	1 Product	173.373.640	3 Product	474.270.040	BKPSDM	Kab. Sumenep
				01.18.02	Seleksi penerimaan calon ASN	Jumlah peserta berdasarkan Pendataan	-	7.000 Orang	2.415.660.500	7.000 Orang	2.657.226.550	7.000 Orang	2.922.949.205	21.000 Orang	7.995.836.255	BKPSDM	Kab. Sumenep
				4.05.01.15	Program Pelayanan Informasi Data Kepegawaian	Persentase Pelaksanaan updating data dan penyampaian informasi kepegawaian	-	80%	1.056.232.470	85%	1.161.855.717	85%	1.333.041.289	85%	3.551.129.476	BKPSDM	Kab. Sumenep
				01.15.01	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data Kepegawaian yang di Update	-	9.269 ASN	650.181.970	9.017 Orang	715.200.167	8.803 Orang	786.720.184	8.803 Orang	2.152.102.321	BKPSDM	Kab. Sumenep
				01.15.02	Pengembangan Informasi Kepegawaian	Jumlah Pengolah DUK, Bezzetting, Buku Profil Kepegawaian	-	122 Buku Cetak	149.420.500	122 Buku Cetak	164.362.550	122 Buku Cetak	180.798.805	366 Buku Cetak	494.581.855	BKPSDM	Kab. Sumenep
				01.15.03	Fasilitasi Profesi Jiwa Korps ASN	Jumlah Peserta Fasilitasi Profesi Jiwa Korps ASN	-	3 Kegiatan	185.000.000	Kegiatan	203.500.000	Kegiatan	278.850.000	10 Kegiatan	667.350.000	BKPSDM	Kab. Sumenep
				01.15.04	Proses Administrasi Pemberhentian ASN	Jumlah Pemberhentian ASN	-	30 Orang	71.630.000	30 Orang	78.793.000	30 Orang	86.672.300	90 Orang	237.095.300	BKPSDM	Kab. Sumenep
				4.05.01.16	Program Pengelolaan Administrasi Mutasi ASN	Persentase Penempatan ASN yang sesuai dengan Analisis Jabatan	-	90%	702.298.500	90%	772.528.350	95%	849.781.185	95%	2.324.608.035	BKPSDM	Kab. Sumenep
				01.16.01	Penataan ASN	Jumlah Jabatan Terisi Sesuai Kompetensi	-	1.134	487.985.000	1.134	536.783.500	1.197	590.461.850	1.197	1.615.230.350	BKPSDM	Kab. Sumenep
01.16.02	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Jumlah SK yang diterbitkan tepat waktu	-	2.600 SK	214.313.500	2.600 SK	235.744.850	2.600 SK	259.319.335	7.800 SK	709.377.685	BKPSDM	Kab. Sumenep				

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Persentase Jumlah aparatur sesuai SOTK	4.05.01.20	Program Pengelolaan Kepangkatan ASN		-	90%	958.661.000	90%	1.054.527.100	95%	1.159.979.810	95%	3.173.167.910	BKPSDM	Kab. Sumenep
					Pengembangan Karir dan Promosi Aparatur	Jumlah Seleksi dan Uji Kompetensi yang dilaksanakan	-	86 ASN	958.661.000	86 ASN	1.054.527.100	86 ASN	1.159.979.810	258 ASN	3.173.167.910	BKPSDM	Kab. Sumenep
		Meningkatnya profesionalisme Aparatur Sipil Negara	Persentase ASN dengan SKP yang Baik	4.05.01.15	Program Peningkatan disiplin ASN	Persentase Nilai SKP yang baik	-	80%	3.241.396.200	80%	3.565.535.820	80%	3.922.089.402	80%	10.729.021.422	BKPSDM	Kab. Sumenep
				01.19.02	Penilaian Kinerja Aparatur	Jumlah ASN dengan Nilai SKP yang Baik	-	178 Orang	798.983.000	178 Orang	878.881.300	178 Orang	966.769.430	534 Orang	2.644.633.730	BKPSDM	Kab. Sumenep
			Persentase Pelanggaran Disiplin	01.19.01	Pembinaan Aparatur	Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin Terealisasi	-	30 Kasus	127.480.000	30 Kasus	140.228.000	30 Kasus	154.250.800	90 Kasus	421.958.800	BKPSDM	Kab. Sumenep
				01.19.03	Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	Jumlah Penerima TPP	-	4.000 PNS	2.314.933.200	4.000 PNS	2.546.426.520	4.000 PNS	2.801.069.172	4.000 PNS	7.662.428.892	BKPSDM	Kab. Sumenep
			Persentase ASN yang lulus diklat dalam 1 tahun	4.06.01.15	Program Pengembangan Kompetensi SDM	Persentase Peserta lulus diklat	-	90%	7.290.623.500	90%	9.431.477.446	90%	11.247.069.796	90%	27.969.170.742	BKPSDM	Kab. Sumenep
				01.15.01	Pengembangan Kompetensi SDM Manajerial	Jumlah peserta yang lulus mengikuti diklat Kompetensi SDM Manajerial	-	336 Orang	5.352.647.500	336 Orang	6.806.372.430	336 Orang	7.487.009.673	1.008 Orang	19.646.029.603	BKPSDM	Kab. Sumenep
				01.15.02	Pengembangan Kompetensi SDM Teknis dan fungsional	Jumlah peserta yang lulus mengikuti diklat Kompetensi SDM Teknis dan Fungsional	-	100 Orang	1.796.593.500	100 Orang	2.469.584.266	100 Orang	3.588.987.298	300 Orang	7.855.165.064	BKPSDM	Kab. Sumenep
				01.15.03	Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur	Jumlah peserta yang lulus kompetensi	-	50 Orang	141.382.500	50 Orang	155.520.750	50 Orang	171.072.825	150 Orang	467.976.075	BKPSDM	Kab. Sumenep

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				4.05.01.01	Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	Persentase pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	-	100%	1.789.298.490	100%	1.968.228.339	100%	2.165.051.173	300%	5.922.578.002	BKPSDM	Kab. Sumenep
				01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat menyurat yang diadministrasikan	-	12.000 Surat	23.532.000	12.000 Surat	25.885.200	12.000 Surat	28.473.720	36.000 Surat	77.890.920	BKPSDM	Kab. Sumenep
				01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	12 Bulan	425.788.000	12 Bulan	468.366.800	12 Bulan	515.203.480	36 Bulan	1.409.358.280	BKPSDM	Kab. Sumenep
				01.01.03	Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	-	34 Jenis Belanja	214.109.750	34 Jenis Belanja	235.520.725	34 Jenis Belanja	259.072.798	102 Jenis Belanja	708.703.273	BKPSDM	Kab. Sumenep
				01.01.04	Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran	Jumlah bahan perkantoran yang disediakan selama 1 TA	-	50 Jenis Belanja	70.299.540	50 Jenis Belanja	77.329.494	50 Jenis Belanja	85.062.443	150 Jenis Belanja	232.691.477	BKPSDM	Kab. Sumenep
				01.01.05	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	-	11 Jenis Belanja	47.022.000	11 Jenis Belanja	51.724.200	11 Jenis Belanja	56.896.620	33 Jenis Belanja	155.642.820	BKPSDM	Kab. Sumenep
				01.01.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	47 Unit	32.250.000	47 Unit	35.475.000	47 Unit	39.022.500	141 Unit	106.747.500	BKPSDM	Kab. Sumenep
				01.01.07	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah tersedianya makanan dan minuman	-	900 Orang	18.300.000	900 Orang	20.130.000	900 Orang	22.143.000	2.700 Orang	60.573.000	BKPSDM	Kab. Sumenep
				01.01.08	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	-	363 Kali	198.088.000	363 Kali	217.896.800	363 Kali	239.686.480	1.089 Kali	655.671.280	BKPSDM	Kab. Sumenep
				01.01.09	Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	-	2 Keg	47.455.000	2 Keg	52.200.500	2 Keg	57.420.550	5 Keg	157.076.050	BKPSDM	Kab. Sumenep
				01.01.11	Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	jumlah layanan perkantoran yang disediakan	-	61 OPD	196.701.000	61 OPD	216.371.100	61 OPD	238.008.210	61 OPD	651.080.310	BKPSDM	Kab. Sumenep
				01.01.15	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	-	11 Unit	110.000.000	11 Unit	121.000.000	11 Unit	133.100.000	33 Unit	364.100.000	BKPSDM	Kab. Sumenep
				01.01.17	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	-	2 Lokasi	159.750.000	2 Lokasi	175.725.000	2 Lokasi	193.297.500	2 Lokasi	528.772.500	BKPSDM	Kab. Sumenep
				01.01.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	-	13 Unit	121.203.200	13 Unit	133.323.520	13 Unit	146.655.872	13 Unit	401.182.592	BKPSDM	Kab. Sumenep

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
				01.01.19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	-	1 Paket	124.800.000	1 Paket	137.280.000	1 Paket	151.008.000	3 Paket	413.088.000	BKPSDM	Kab. Sumenep	
				4.05.01.02	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	-	-	-	-	-	-	100%	59.920.289	100%	59.920.289	BKPSDM	Kab. Sumenep
				01.02.02	Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian	Jumlah jenis pengelolaan kepegawaian tepat waktu	-	-	-	-	-	-	1 Paket	59.920.289	1 Paket	59.920.289	BKPSDM	Kab. Sumenep
				4.05.01.03	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	-	100%	20.332.000	100%	22.365.200	100%	24.601.720	100%	67.298.920	BKPSDM	Kab. Sumenep	
				01.03.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang disusun	-	5 Dok Keu	12.622.000	5 Dok Keu	13.884.200	5 Dok Keu	15.272.620	15 Dok Keu	41.778.820	BKPSDM	Kab. Sumenep	
				01.03.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	-	7 Dok	7.710.000	7 Dok	8.481.000	7 Dok	9.329.100	21 Dok	25.520.100	BKPSDM	Kab. Sumenep	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten pada unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia serta tugas pembantuan guna untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Indikator kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep disusun berdasarkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi, serta berdasarkan pada sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

Tujuan Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep sesuai dengan Sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021, yaitu **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Kepegawaian**, dengan indikator tujuan yaitu **Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)**.

Tujuan Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep tersebut kemudian dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Penataan SDM ASN sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi;
2. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara;
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Kepegawaian.

Untuk lebih jelasnya hubungan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat dilihat pada matrik dibawah ini :

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Bidang Kepegawaian	Nilai SKM	Meningkatnya Kualitas Penataan SDM ASN sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN sesuai dengan Usulan Formasi 2. Persentase Penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi 3. Persentase Jumlah aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam SOTK
		Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase ASN yang lulus diklat dalam satu tahun 2. Persentase ASN dengan Nilai SKP yang Baik. 3. Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai.
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Kepegawaian	Hasil SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)

Berdasarkan matriks tersebut diatas, diketahui bahwa ada 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dan Renstra, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Hasil SKM	76	78	80	83	86	87	87
2.	Persentase Pemenuhan kebutuhan ASN sesuai dengan usulan formasi	n/a	n/a	n/a	50	75	75	75
3.	Persentase Penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi	85	85	85	90	90	95	95
4.	Persentase Jumlah aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam SOTK	87	89	91	93	94	95	95
5.	Persentase ASN yang lulus diklat dalam Satu Tahun	90	90	90	90	90	90	90
6.	Persentase ASN dengan Nilai SKP yang Baik	n/a	n/a	n/a	80	80	80	80
7.	Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep merupakan penjabaran dari perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan arah dan kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep, dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang (2016-2021), bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan dalam upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sesuai visi, misi, dan program Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dapat terwujud.

Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 merupakan penyesuaian atas perencanaan yang telah ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun dalam Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2017. Selain itu dengan restrukturisasi program serta kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten sumenep selaku Perangkat Daerah penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep. Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep sebagai alat untuk mengarahkan guna pencapaian tujuan organisasi yang sekaligus merupakan awal dari proses akuntabilitas organisasi.

Meskipun disadari bahwa terwujudnya aparatur birokrasi Kabupaten Sumenep lebih bersih, profesionalisme dan sejahtera bukan

merupakan hal yang mudah untuk diwujudkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep selaku Satuan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep, namun demikian mengingat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep sebagai perangkat daerah yang mempunyai peran dalam mengemban amanat Bupati Sumenep, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep mempunyai kewajiban mengaktualisasikan perannya lima tahun ke depan dalam langkah nyata sesuai kompetensi intinya di bidang pelayanan manajemen kepegawaian dan mudah-mudahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep terus berkembang dinamis seiring perubahan lingkungan dan tuntutan perubahan paradigma menuju perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

Semoga dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 semua perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan dapat lebih terarah untuk peningkatan kualitas pelayanan khususnya di bidang kepegawaian.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SUMENEP**



R. TITIK SURYATI, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660409 199302 2 002

LAMPIRAN

- **Penyelarasan Rencana Strategi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Sumenep.**

PENYELARASAN RENCANA STRATEGI PERANGKAT DAERAH DENGAN RPJMD PEMKAB. SUMENEP
NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA BKPSDM TANGGAL 28 MEI 2018
RPJMD PEMKAB. SUMENEP

No	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI RPJMD	KEBIJAKAN RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4 Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan Accountable	1 Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan Accountable	Nilai SKM	2 Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah Daerah	1 Nilai SKM Unit-unit layanan Publik 2 E-Government	1 Melakukan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat 2 Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	1 Menyelenggarakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan administratif kepegawaian 1 Pengembangan Sistem Pelaporan

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dibidang Kepegawaian	Nilai SKM	1 Meningkatnya Kualitas Penataan SDM ASN sesuai dengan Kebutuhan dan Kompetensi	1 Persentase Akurasi Updating data kepegawaian 3 Persentase Pemenuhan Formasi sesuai dengan Kebutuhan 4 Persentase Penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi 5 Persentase Jumlah aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam SOTK	* Optimalisasi updating data kepegawaian di Kabupaten Sumenep * Optimalisasi sumber daya aparatur terkait latar belakang pendidikan (formal dan in formal) keahlian, pangkat, analisa jabatan dan sebagainya dengan penempatan pegawai	* Memenuhi pengadaan sarana prasarana SIMPEG dan menyusun Tim Updating Data Kepegawaian * Mengoptimalkan data dan Informasi tentang kompetensi pegawai dan Membentuk Tim Penilai Kinerja PNS dalam menyusun SK Penempatan Pegawai	1 Program Pelayanan Informasi Data Kepegawaian 2 Program Penyusunan Formasi dan Pengadaan ASN 3 Program Pengelolaan Administrasi Mutasi ASN 4 Program Peningkatan disiplin ASN	- Persentase Pelaksanaan updating data dan penyampaian informasi kepegawaian Persentase Pelaksanaan Fasilitas Profesi Jiwa Korps ASN - Persentase hasil seleksi sesuai dengan kebutuhan formasi - Persentase Pemepatan ASN yang sesuai dengan Analisis Jabatan - Persentase Jabatan Struktural Terisi dalam SOTK	- Pengelolaan Data Kepegawaian - Pengembangan Informasi Kepegawaian - Fasilitas Profesi Jiwa Korps ASN - Proses Administrasi Pemberhentian ASN - Penyusunan Formasi dan Kebutuhan ASN - Seleksi penerimaan calon ASN - Penataan ASN - Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS - Pengembangan Karir dan Promosi Aparatur - Penilaian Kinerja Aparatur - Pembinaan Aparatur - Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	- Jumlah kelompok data yang diupdate Jumlah penyampaian informasi kepegawaian : 1. Mengeloh DUK : 2. Buku Profil BKPSDM : 3. Buku Peraturan : Jumlah Peserta Fasilitas Profesi Jiwa Korps ASN Jumlah SK Pemberhentian ASN - Jumlah Data kebutuhan ASN sesuai formasi Jumlah pelaksanaan seleksi ASN - Jumlah Jabatan Terisi Sesuai Kompetensi - Jumlah SK yang diterbitkan tepat waktu : 1. SK Kenaikan Pangkat - Jumlah Seleksi dan Uji Kompetensi yang dilaksanakan - Jumlah ASN dengan Nilai SKP yang Baik Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin terselesaikan Jumlah Penerima TPP

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				6 Persentase ASN yang lulus diklat dalam Satu Tahun	* Mengoptimalkan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	* Menyelenggarakan diklat aparatur pemerintahan secara selektif sesuai prioritas daerah	5 Program Pengembangan Kompetensi SDM	- Persentase Peserta Lulus Diklat	- Pengembangan Kompetensi SDM Manajerial - Pengembangan Kompetensi SDM Teknis dan fungsional - Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur	- Jumlah Pelaksanaan diklat Kompetensi SDM Manajerial - Jumlah Pelaksanaan diklat Kompetensi SDM Teknis dan Fungsional - Jumlah Pelaksanaan Diklat kompetensi SDM
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dibidang Kepegawaian	Nilai SKM	3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dibidang Kepegawaian	5 Hasil Survey Kepuasan Aparatur	Membangun manajemen operasional dan kualitas sumber daya aparatur yang efektif, efisien dan akuntabel dengan arah kebijakan melaksanakan manajemen operasional dan sumber daya aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPSDM	Melaksanakan manajemen operasional dan sumber daya aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPSDM	6 Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	- % pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	- Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor - Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran - Penyediaan komponen instalasi listrik/pemerangan bangunan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi - Peringatan Hari-Hari Besar - Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran - Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	- Jumlah Surat menyurat yang diadministrasikan - Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor - Jumlah bahan perkantoran yang disediakan selama 1 TA - Jumlah komponen listrik yang diadakan - jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - jumlah tersedianya makanan dan minuman - Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi - Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan - jumlah layanan perkantoran yang disediakan - Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli - Jumlah gedung kantor yang dipelihara - Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara - Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
							7 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	% Persentase Penunjang Kerja Aparatur Sipil Negara	- Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian	- Jumlah jenis pengelolaan kepegawaian tepat waktu
							8 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	- Penyusunan Laporan Keuangan - Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu - Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu